



Journal Abdimas  
Maduma

# JURNAL ABDIMAS MADUMA

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 5 No. 2, April 2026

e- ISSN 2828 - 7614 , p-ISSN 2828 - 6812

Available online at:

<https://journal.eltaorganization.org/index.php/ecdj>

## Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Kersik, Kutai Kartanegara

Muhammad Fauzan Noor<sup>1\*</sup>, Dini Zulfiani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pariwisata, Politeknik Negeri Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Indonesia

\*Correspondence Email : [m.fauzan\\_noor@polnes.ac.id](mailto:m.fauzan_noor@polnes.ac.id)

### Abstract

#### ARTICLE INFO

##### Article History:

Received : January 2, 2026

Reviewed : January 4, 2026

Revised : February 3, 2026

Accepted : April 11, 2026

Available online : April 14, 2026

##### Keywords:

*Tourism village; Institutional governance; Pokdarwis; Sustainable tourism*

*This Community Service (PkM) activity aims to strengthen institutional governance in the development of sustainable tourism in Kersik Village, Kutai Kartanegara Regency, with the main focus on strengthening the capacity of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) as tourism village management actors. The initial problems identified based on the table data show that the institutional function of Pokdarwis is not optimal, which is characterized by the absence of a written vision and mission, an unclear organizational structure, the lack of a tiered work program, and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for tourism management and services. The method of implementing activities is carried out through a participatory mentoring approach that includes socialization, focused discussions, training, and practices in the preparation of institutional documents by involving Pokdarwis administrators, village governments, and community representatives. The main results of activities based on activity evaluation results show an increase in the institutional capacity of Pokdarwis which is reflected in the preparation of a sustainability-oriented vision and mission, a more functional organizational structure, the design of short-to-long-term work programs, and the initial SOPs for tourism management and promotion. This activity also resulted in a joint commitment from participants to implement the results of mentoring in a sustainable manner. The conclusion of the program shows that strengthening institutional governance is an important foundation in encouraging the development of a directed, participatory, and sustainable tourism village in Kersik Village.*

### Abstrak

#### INFO ARTIKEL

##### Proses Artikel:

Submit : 2 Januari 2026

Review : 4 Januari 2026

Revisi : 3 Februari 2026

Diterima : 11 April 2026

Terbit Online : 14 April 2026

##### Kata Kunci :

**Desa wisata; tata kelola kelembagaan; Pokdarwis; Pariwisata berkelanjutan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Kersik, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus utama pada penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor pengelola desa wisata. Permasalahan awal yang teridentifikasi berdasarkan data tabel menunjukkan belum optimalnya fungsi kelembagaan Pokdarwis, yang ditandai dengan ketiadaan visi dan misi tertulis, struktur organisasi yang belum jelas, belum tersusunnya program kerja berjenjang, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan wisata. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan pendampingan partisipatif yang mencakup sosialisasi, diskusi terfokus, pelatihan, dan praktik penyusunan dokumen kelembagaan dengan melibatkan pengurus Pokdarwis, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Hasil utama kegiatan berdasarkan data tabel menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Pokdarwis yang tercermin dari tersusunnya visi dan misi berorientasi keberlanjutan, struktur organisasi yang lebih fungsional, rancangan program kerja jangka pendek hingga panjang, serta SOP awal pengelolaan dan promosi wisata. Kegiatan ini juga menghasilkan komitmen bersama dari peserta untuk menerapkan hasil pendampingan secara berkelanjutan. Kesimpulan program menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan merupakan fondasi penting dalam mendorong pengembangan desa wisata yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan di Desa Kersik.

## 1. PENDAHULUAN

Konten Pariwisata desa telah berkembang menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan wilayah berkelanjutan, khususnya di negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya seperti Indonesia. Desa wisata tidak lagi dipahami semata sebagai ruang rekreasi, melainkan sebagai arena sosial-ekonomi yang menuntut tata kelola kelembagaan yang kuat, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan serta kebutuhan masyarakat lokal. Literatur global dan nasional menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata desa sangat bergantung pada kemampuan institusi lokal dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan, membangun kepercayaan publik, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan (Jia et al., 2022; Orozco et al., 2024; Yiqing et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, penguatan kelembagaan desa melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga desa lainnya menjadi kunci utama dalam mendorong pariwisata berbasis masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan (Firdaus et al., 2021; Handiman et al., 2024). Desa Kersik di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan salah satu contoh desa yang memiliki potensi wisata alam pesisir yang besar, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam aspek tata kelola kelembagaan dan manajemen organisasi pariwisata desa.

Desa Kersik ditetapkan sebagai bagian dari program pengembangan desa wisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan potensi utama Pantai Biru Kersik yang menawarkan panorama laut, garis pantai yang luas, serta peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Pokdarwis “Pantai

Biru” Desa Kersik telah terbentuk sejak tahun 2013 dan secara formal diperkuat melalui SK Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, yang menegaskan legitimasi kelembagaan pengelola wisata desa. Namun demikian, hasil identifikasi permasalahan menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Desa Kersik masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, antara lain belum optimalnya koordinasi antar-lembaga desa, keterbatasan infrastruktur dasar wisata, rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal dalam manajemen destinasi dan promosi digital, serta ketiadaan regulasi dan perencanaan wisata yang terstruktur di tingkat desa . Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai studi yang menyatakan bahwa lemahnya arsitektur tata kelola dan kapasitas institusional desa sering kali menjadi hambatan utama dalam mencapai keberlanjutan pariwisata desa (He et al., 2021; Saputro et al., 2023).

Urgensi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Kersik menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan potensi dampak negatif yang dapat muncul apabila pengembangan wisata tidak disertai dengan tata kelola kelembagaan yang memadai. Literatur tentang “governing the tourism commons” menegaskan bahwa tanpa institusi lokal yang mampu mengatur penggunaan sumber daya secara kolektif dan berkelanjutan, pariwisata desa berisiko mengalami degradasi lingkungan, konflik sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Yiqing et al., 2024). Temuan lapangan di Desa Kersik juga mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelestarian lingkungan pantai dan tata ruang kawasan wisata akibat aktivitas wisata yang belum terkelola secara sistematis, termasuk penggunaan lahan oleh warga untuk berjualan yang belum tertata . Kondisi ini mempertegas pandangan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan prasyarat ekologis dan sosial untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata desa (Li et al., 2025; Widawski et al., 2023).

Berdasarkan hasil dari asesmen awal yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Desa dan pengurus Pokdarwis, serta diskusi kelompok terfokus (FGD), disimpulkan bahwa Desa Kersik membutuhkan intervensi pendampingan yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen organisasi Pokdarwis. Asesmen ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dan semangat masyarakat lokal untuk mengembangkan desa wisata, namun masih terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan visi, misi, struktur organisasi, program kerja, serta standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan wisata. Literatur empiris menegaskan bahwa penguatan kapasitas institusional melalui pendampingan, pelatihan, dan pembelajaran organisasi merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kinerja pariwisata desa berkelanjutan, khususnya ketika difokuskan pada aktor kunci seperti Pokdarwis dan BUMDes (Handiman et al., 2024; Sutomo et al., 2024).

Tujuan utama dari Program Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah melakukan pendampingan penguatan tata kelola kelembagaan Pokdarwis Pantai Biru Kersik agar mampu menjalankan fungsi organisasi secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pokdarwis dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi yang berorientasi pada ekowisata berkelanjutan, membentuk struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas, menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menyusun draft SOP pada aspek pelayanan wisata, administrasi, keuangan, dan promosi digital . Tujuan ini sejalan dengan kerangka Community-Based Tourism (CBT) yang menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya wisata, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan dan keberlanjutan sosial-ekonomi desa wisata (Anarini et al., 2024; Rudiyanto & Hutagalung, 2021).

Keterkaitan kegiatan PkM ini dengan literatur yang ada sangat kuat dan bersifat saling menguatkan. Studi Orozco et al., (2024) menunjukkan bahwa *collaborative governance* berperan sebagai mediator penting dalam menghubungkan kolaborasi pemangku kepentingan dengan pencapaian pembangunan wilayah berkelanjutan melalui pariwisata desa. Sementara itu, penelitian di Indonesia menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan desa, seperti yang terjadi di Desa Wisata Pujonkidul, mampu meningkatkan kinerja pariwisata desa secara signifikan (Firdaus et al., 2021; Handiman et al., 2024). Pendampingan tata kelola kelembagaan di Desa Kersik juga selaras dengan temuan Jia et al., (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi komunitas dan kepercayaan terhadap institusi lokal berkontribusi langsung terhadap kepuasan hidup warga dan keberlanjutan sosial pariwisata desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, urgensi kegiatan, tujuan program, serta dukungan literatur yang relevan, maka rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi awal tata kelola kelembagaan Pokdarwis Pantai Biru Kersik dalam pengelolaan desa wisata; (2) bagaimana proses pendampingan penguatan kelembagaan dan manajemen organisasi dapat meningkatkan kapasitas Pokdarwis dalam perencanaan dan pengelolaan wisata desa; dan (3) bagaimana hasil pendampingan tersebut berkontribusi terhadap kesiapan Desa Kersik menuju desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Rumusan masalah ini menjadi fondasi analitis bagi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PkM, sekaligus menegaskan posisi program ini sebagai intervensi berbasis bukti (*evidence-based governance*) dalam pengembangan pariwisata desa berkelanjutan (Huang et al., 2023; Saputro et al., 2023)

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PkM ini menggunakan desain pelatihan–pendampingan intensif (*workshop partisipatif*) selama dua hari (31 Mei–1 Juni 2025) yang berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan dan manajemen organisasi Pokdarwis sebagai prasyarat praktik *collaborative governance* dan penguatan institusi lokal desa wisata (Orozco et al., 2024; Yiqing et al., 2024). Peserta kegiatan melibatkan unsur kunci ekosistem desa wisata, yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua dan Sekretaris Pokdarwis Pantai Biru Kersik, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (bidang pengelolaan destinasi), serta kelompok masyarakat pendukung seperti Karang Taruna, kelompok ibu-ibu UMKM, pengurus koperasi Merah Putih, dan pengelola desa, sejalan dengan penekanan pentingnya keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kinerja pariwisata berkelanjutan (Handiman et al., 2024; Jia et al., 2022). Instrumen kegiatan meliputi panduan fasilitasi penyusunan visi–misi, lembar kerja pemetaan struktur organisasi dan *job description*, format penyusunan AD/ART, *template* identifikasi kebutuhan SOP (pelayanan, administrasi, keuangan, promosi digital), serta modul “7 Tahapan Penyusunan Program Kerja” untuk merancang program jangka pendek–menengah–panjang berbasis target SMART. Tahapan pelaksanaan mengikuti alur: identifikasi permasalahan, asesmen awal, implementasi *job description* dari struktur organisasi, penyusunan SOP, pendampingan penyusunan program kerja, pendampingan perumusan visi–misi, dan penetapan tujuan organisasi. Teknik pengumpulan data kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan di area Pantai Biru, diskusi/FGD internal dengan pengurus Pokdarwis, wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa terkait perencanaan dan isu penataan lahan aktivitas warga, serta dokumentasi kegiatan (foto, daftar hadir, dan bukti draf dokumen kelembagaan). Teknik analisis evaluasi menggunakan analisis deskriptif–kualitatif terhadap perubahan capaian kelembagaan (rumusan visi–misi, kejelasan struktur dan pembagian peran, tersusunnya draft program kerja, serta terbentuknya SOP awal) sebagai indikator kesiapan tata kelola dan pembelajaran institusional, yang

sejalan dengan prinsip evaluasi berkelanjutan berbasis bukti dalam pengembangan pariwisata desa (Huang et al., 2023; Saputro et al., 2023). Output tersebut kemudian ditafsirkan sebagai penguatan kapasitas institusi lokal untuk mengelola sumber daya wisata secara lebih tertib, kolaboratif, dan berorientasi keberlanjutan, termasuk mitigasi risiko lingkungan melalui tata kelola yang lebih terstruktur (He et al., 2021; Li et al., 2025).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahap awal kegiatan, hasil asesmen menunjukkan bahwa Pokdarwis Pantai Biru Kersik belum memiliki visi dan misi organisasi yang terdokumentasi secara formal, struktur organisasi belum disertai pembagian tugas yang jelas, serta belum tersusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang yang terarah. Selain itu, pada kondisi awal juga dicatat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis untuk pelayanan wisata, administrasi, keuangan, dan promosi digital. Setelah pelaksanaan kegiatan pendampingan selama dua hari, data hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan kondisi kelembagaan berupa tersusunnya visi dan misi Pokdarwis, struktur organisasi yang lebih jelas, draft program kerja berjenjang, serta SOP awal pelayanan wisata dan promosi digital yang mulai disusun.

Observasi awal mencatat bahwa kawasan Pantai Biru memiliki potensi alam berupa garis pantai yang luas dan panorama laut yang menarik, namun fasilitas pendukung wisata masih terbatas, seperti belum tersedianya toilet umum yang memadai, papan informasi, serta penataan area berjualan warga yang belum teratur. Dari sisi sosial, observasi mencatat lingkungan desa dengan karakter religius-konservatif dan adanya kelompok masyarakat yang telah terlibat dalam aktivitas wisata, seperti Pokdarwis, Karang Taruna, dan kelompok UMKM. Selama kegiatan pendampingan, observasi proses menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi penyusunan visi, misi, struktur organisasi, dan program kerja. Peserta terlibat dalam praktik langsung penyusunan draft SOP, pemetaan tugas pengurus, serta diskusi kelompok terkait kebutuhan pengembangan destinasi. Observasi juga mencatat penggunaan fasilitas mitra seperti aula desa, pengeras suara, papan informasi, serta dukungan teknis berupa laptop dan printer yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen kelembagaan.

Dalam diskusi awal dengan Ketua dan Sekretaris Pokdarwis, dicatat adanya kesepahaman bahwa kegiatan pendampingan diperlukan “untuk memberikan penguatan tata kelola agar Desa Kersik siap melangkah menuju desa wisata mandiri dan berkelanjutan”. Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa mencatat pembahasan terkait perencanaan pengembangan desa wisata serta permasalahan penggunaan lahan pantai oleh warga untuk berjualan yang “belum teratur” dan memerlukan penataan kelembagaan. Dalam sesi diskusi dan praktik penyusunan visi, dicatat kesepakatan peserta bahwa visi Pokdarwis diarahkan pada “pengembangan Desa Kersik sebagai destinasi ekowisata pantai berbasis masyarakat yang berkelanjutan”. Pada diskusi lanjutan, misi organisasi dirumuskan dengan penekanan pada peningkatan kapasitas anggota, pengembangan atraksi pantai, serta kemitraan dengan pemerintah dan swasta.

Peserta yang terlibat secara langsung meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Sekretaris Pokdarwis Pantai Biru Kersik, serta Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Wisata dari unsur pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, kelompok ibu-ibu UMKM, pengelola desa, dan pengurus Koperasi Merah Putih. Keterlibatan peserta aktif ditunjukkan melalui partisipasi dalam diskusi interaktif, praktik

penyusunan SOP, serta perumusan visi, misi, dan program kerja. Seluruh data ini disajikan sebagai deskripsi kehadiran dan keterlibatan aktor sebagaimana tercantum dalam tabel kegiatan.

Komitmen dari para pihak yang terlibat tersebut tercermin dalam rencana keberlanjutan kegiatan, antara lain melanjutkan finalisasi SOP Pokdarwis Kersik agar dapat diimplementasikan secara konsisten, mendorong penguatan infrastruktur dasar wisata melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta melakukan evaluasi rutin terhadap program kerja Pokdarwis . Selain itu, terdapat komitmen untuk melibatkan lebih banyak pemuda desa dalam proses kaderisasi serta mengembangkan narasi promosi desa dengan pendekatan *sustainability branding*.

Capaian kualitatif meliputi tersusunnya visi dan misi Pokdarwis Kersik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kearifan lokal, terbentuknya struktur organisasi Pokdarwis dengan hierarki dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, serta meningkatnya kesadaran anggota masyarakat bahwa keberhasilan desa wisata ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak . Capaian kuantitatif yang dicantumkan dalam tabel berbentuk keluaran dokumen, yaitu tersusunnya draft program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, serta tersusunnya SOP awal untuk pelayanan wisata dan promosi digital.



**Gambar 1. Tim Memberikan Materi dalam Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan**

### 3. PEMBAHASAN

Temuan utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Kersik menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan Pokdarwis melalui pendampingan terstruktur berperan sebagai fondasi awal bagi pembentukan sistem pengelolaan desa wisata yang lebih tertata dan berorientasi keberlanjutan. Kondisi ini selaras dengan temuan literatur yang menyatakan bahwa kelemahan utama pariwisata desa sering kali terletak pada absennya arsitektur tata kelola kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi (Firdaus et al., 2021; He et al., 2021). Setelah kegiatan pendampingan, Pokdarwis berhasil merumuskan visi dan misi organisasi, membentuk struktur organisasi dengan pembagian tugas, menyusun draft program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menyusun SOP awal pelayanan wisata dan promosi digital. Temuan ini menguatkan argumen bahwa penguatan kelembagaan desa merupakan prasyarat awal bagi praktik *collaborative governance* yang efektif dalam pengembangan pariwisata desa berkelanjutan (Orozco et al., 2024; Yiqing et al., 2024).

Jika dikaitkan dengan rumusan masalah pertama PkM, yaitu kondisi awal tata kelola kelembagaan Pokdarwis Pantai Biru Kersik, data kegiatan menunjukkan bahwa tata kelola awal masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan secara formal. Ketiadaan dokumen visi–misi, SOP, serta program kerja menunjukkan bahwa pengelolaan wisata lebih bertumpu pada praktik informal

dan belum berbasis perencanaan jangka menengah dan panjang. Literatur menyebutkan bahwa kondisi seperti ini berisiko menimbulkan konflik peran, rendahnya konsistensi pelayanan, serta lemahnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya wisata (Handiman et al., 2024; Jia et al., 2022). Dengan demikian, hasil asesmen awal yang tercantum dalam tabel mengonfirmasi relevansi intervensi PkM sebagai respons terhadap kesenjangan kapasitas kelembagaan yang secara luas juga ditemukan pada banyak desa wisata di Indonesia.

Menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana proses pendampingan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pokdarwis, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan–pendampingan partisipatif mampu mendorong pembelajaran institusional di tingkat komunitas. Proses penyusunan visi, misi, struktur organisasi, program kerja, dan SOP dilakukan melalui diskusi interaktif dan praktik langsung, sehingga menghasilkan dokumen yang disepakati bersama oleh pengurus Pokdarwis dan pemangku kepentingan desa. Hal ini sejalan dengan literatur CBT dan tata kelola partisipatif yang menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan meningkatkan legitimasi kebijakan serta keberlanjutan program pariwisata desa (Anarini et al., 2024; Rudiyanto & Hutagalung, 2021). Dengan kata lain, peningkatan kapasitas kelembagaan yang terjadi bukan hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mencerminkan proses penguatan kapasitas sosial dan organisasi Pokdarwis.

Signifikansi kegiatan PkM ini dapat dipahami melalui kontribusinya dalam membangun prasyarat tata kelola yang memungkinkan pengelolaan sumber daya wisata yang lebih tertib dan berkelanjutan. Literatur *governing the tourism commons* menekankan bahwa institusi lokal yang mampu mengatur penggunaan sumber daya secara kolektif memiliki peluang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan siklus hidup pariwisata desa (Yiqing et al., 2024). Data tabel menunjukkan bahwa setelah kegiatan, Pokdarwis memiliki arah organisasi yang lebih jelas, yang tercermin dalam visi–misi dan program kerja yang berorientasi pada ekowisata pantai berbasis masyarakat. Dengan adanya SOP awal, terdapat dasar operasional untuk pelayanan wisata dan promosi digital, yang berpotensi meningkatkan konsistensi layanan dan pengalaman wisatawan, sebagaimana disarankan dalam kajian perencanaan dan manajemen pariwisata desa berkelanjutan (Huang et al., 2023; Saputro et al., 2023).

Kontribusi kegiatan terhadap praktik Pengabdian kepada Masyarakat terletak pada penerjemahan konsep-konsep tata kelola kelembagaan dan CBT ke dalam praktik pendampingan yang aplikatif di tingkat desa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa PkM tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator proses institusionalisasi tata kelola di komunitas lokal. Pendampingan yang dilakukan menghasilkan keluaran konkret berupa dokumen kelembagaan, yang merupakan indikator penting dalam praktik *evidence-based governance* pariwisata desa (Handiman et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan ini memperkaya praktik PkM di bidang pariwisata dengan menempatkan kelembagaan lokal sebagai fokus utama intervensi, bukan semata pada peningkatan atraksi atau promosi wisata.

Implikasi praktis dari temuan kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Pokdarwis dapat menjadi titik masuk strategis untuk pengembangan desa wisata yang lebih berkelanjutan. Struktur organisasi yang jelas dan program kerja berjenjang memungkinkan Pokdarwis merencanakan kegiatan secara lebih sistematis dan terukur. Hal ini relevan dengan literatur yang menekankan pentingnya perencanaan jangka menengah dan panjang untuk mengelola kapasitas lingkungan dan sosial desa wisata (Li et al., 2025; Widawski et al., 2023). Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan desa dalam kegiatan pendampingan mencerminkan praktik

kolaborasi lintas aktor yang direkomendasikan dalam pengembangan pariwisata desa berkelanjutan (Orozco et al., 2024; Wan & Sikka, 2023).

Dari perspektif keberlanjutan program, data tabel menunjukkan adanya rencana tindak lanjut berupa finalisasi SOP, penguatan infrastruktur dasar melalui sinergi dengan pemerintah daerah, evaluasi rutin program kerja, serta pelibatan pemuda desa dalam kaderisasi. Rencana ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata desa memerlukan pembelajaran institusional berkelanjutan dan adaptasi kebijakan terhadap perubahan konteks lokal (He et al., 2021; Huang et al., 2023). Dengan adanya dokumen kelembagaan yang telah disusun, Pokdarwis memiliki modal awal untuk melanjutkan proses penguatan kapasitas secara mandiri maupun melalui kemitraan lanjutan dengan pemerintah daerah dan institusi pendamping.

Namun demikian, pembahasan ini juga perlu menguraikan batasan kegiatan sesuai kondisi yang tercantum dalam tabel. Pertama, kegiatan PkM dilaksanakan dalam durasi yang relatif singkat, yaitu dua hari, sehingga keluaran yang dihasilkan masih berupa draft awal dan belum seluruhnya diimplementasikan dalam praktik operasional jangka panjang. Kedua, data tabel menunjukkan bahwa kegiatan lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan manajemen organisasi, sehingga dampak terhadap peningkatan kunjungan wisata, pendapatan ekonomi, atau kualitas lingkungan belum dapat diukur secara langsung. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dasar wisata yang telah diidentifikasi pada tahap awal masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi kebijakan dan dukungan sumber daya di luar cakupan kegiatan PkM ini.

Batasan lain yang relevan adalah bahwa evaluasi kegiatan masih bersifat deskriptif-kualitatif, berdasarkan perubahan dokumen dan observasi proses, tanpa pengukuran kuantitatif terstandar. Kondisi ini sejalan dengan tahap awal penguatan kelembagaan, namun juga menunjukkan perlunya evaluasi lanjutan untuk menilai efektivitas implementasi SOP dan program kerja dalam jangka menengah dan panjang, sebagaimana direkomendasikan dalam literatur evaluasi pariwisata desa berkelanjutan (Saputro et al., 2023). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipahami sebagai fase awal dari proses pembangunan kapasitas kelembagaan yang lebih panjang dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM di Desa Kersik memberikan kontribusi nyata dalam menjawab permasalahan tata kelola kelembagaan desa wisata melalui pendekatan pendampingan berbasis komunitas. Temuan kegiatan konsisten dengan literatur internasional dan nasional yang menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata desa berkelanjutan bergantung pada kekuatan institusi lokal, partisipasi komunitas, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan segala capaian dan batasannya, kegiatan ini menegaskan posisi PkM sebagai instrumen strategis untuk menjembatani teori tata kelola pariwisata desa dengan praktik nyata di tingkat komunitas lokal, khususnya dalam konteks pengembangan desa wisata pesisir berbasis masyarakat seperti Desa Kersik.



**Gambar 2. Diagram Alir Pengembangan Kelembagaan Pokdarwis Desa Kersik Melalui Pendampingan Partisipatif**

**Penjelasan Kerangka Pikir:**

**1. Konteks Awal (Kondisi Eksisting Desa Wisata Kersik)**

Desa Kersik memiliki potensi wisata pantai (Pantai Biru Kersik) dan telah memiliki Pokdarwis sebagai lembaga pengelola, namun pengelolaan pariwisata masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan manajerial. Kondisi awal ditandai oleh lemahnya koordinasi antar lembaga desa, belum tersusunnya visi-misi organisasi, struktur organisasi yang belum fungsional, ketiadaan program kerja berjenjang, serta belum adanya SOP pelayanan dan pengelolaan wisata. Keterbatasan infrastruktur dasar dan kapasitas SDM turut memperkuat urgensi intervensi kelembagaan berbasis pendampingan.

**2. Permasalahan Inti (Masalah Kelembagaan dan Tata Kelola)**

Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya tata kelola kelembagaan Pokdarwis sebagai aktor kunci pengelolaan desa wisata. Masalah ini mencakup aspek perencanaan organisasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, standar operasional, serta lemahnya dasar regulatif internal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan pengelolaan wisata dan meningkatkan risiko degradasi lingkungan serta konflik kepentingan.

**3. Landasan Konseptual (Basis Teoretis Kegiatan)**

Penguatan kelembagaan desa wisata dipahami sebagai prasyarat terciptanya pariwisata desa berkelanjutan berbasis masyarakat. Literatur menekankan pentingnya:

- Collaborative governance sebagai kerangka koordinasi multipihak,
- Community-Based Tourism (CBT) sebagai pendekatan pemberdayaan komunitas,
- Kepercayaan institusional dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi legitimasi kebijakan,
- Perencanaan, SOP, dan pembelajaran institusional sebagai mekanisme keberlanjutan tata kelola.

Landasan ini menjadi rujukan konseptual dalam merancang bentuk intervensi PkM di Desa Kersik.

#### 4. Strategi Intervensi (Desain Program PkM)

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, dirancang program PkM berbasis pelatihan dan pendampingan kelembagaan yang berfokus pada:

- Penguatan kapasitas organisasi Pokdarwis,
- Penataan tata kelola internal,
- Penyusunan dokumen kelembagaan sebagai dasar operasional pengelolaan wisata.

Strategi ini dipilih karena selaras dengan kebutuhan hasil asesmen awal dan konteks sosial kelembagaan Desa Kersik.

#### 5. Proses Pelaksanaan (Tahapan Kegiatan)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap melalui:

- a. Identifikasi permasalahan dan asesmen awal,
- b. Pendampingan penyusunan visi dan misi organisasi,
- c. Penataan struktur organisasi dan pembagian tugas,
- d. Penyusunan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang,
- e. Penyusunan draft SOP pelayanan, administrasi, keuangan, dan promosi,
- f. Diskusi, praktik langsung, dan dokumentasi hasil.

Seluruh tahapan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan aktor kunci desa.

#### 6. Output Kegiatan (Hasil Langsung)

Output utama kegiatan PkM meliputi:

- a. Dokumen visi dan misi Pokdarwis berorientasi keberlanjutan,
- b. Struktur organisasi Pokdarwis yang lebih jelas dan fungsional,
- c. Draft program kerja berjenjang,
- d. Draft awal SOP pelayanan wisata dan promosi digital,
- e. Meningkatnya kesadaran kolektif tentang pentingnya kolaborasi dan tata kelola.

Output ini menjadi indikator awal penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata.

#### 7. Outcome Antara (Perubahan Kelembagaan)

Sebagai dampak langsung dari output kegiatan, terjadi perubahan pada:

- a. Arah dan orientasi organisasi Pokdarwis,
- b. Kejelasan peran dan tanggung jawab pengurus,
- c. Kesiapan kelembagaan untuk mengelola destinasi secara lebih tertib,
- d. Terbentuknya dasar pembelajaran institusional dan tata kelola internal.

Outcome ini menunjukkan peningkatan kesiapan Desa Kersik menuju pengelolaan desa wisata yang lebih terstruktur.

#### 8. Implikasi Keberlanjutan (Rencana Tindak Lanjut)

Keberlanjutan program diarahkan melalui:

- a. Finalisasi dan implementasi SOP,
- b. Evaluasi rutin program kerja Pokdarwis,
- c. Penguatan infrastruktur dasar melalui sinergi dengan pemerintah daerah,
- d. Kaderisasi dan pelibatan pemuda desa,
- e. Pengembangan narasi promosi desa berbasis keberlanjutan.

Langkah-langkah ini memperpanjang dampak PkM dari jangka pendek ke jangka menengah dan panjang.

#### 9. Posisi Kontribusi PkM

Dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini berkontribusi sebagai:

- a. Model pendampingan kelembagaan desa wisata berbasis CBT,
- b. Praktik penerjemahan konsep tata kelola pariwisata desa ke level operasional,
- c. Fase awal pembangunan kapasitas institusional desa wisata pesisir.

#### 10. Kesimpulan Kerangka Berpikir

Secara keseluruhan, kerangka berpikir PkM ini menempatkan masalah kelembagaan sebagai titik awal, pendampingan tata kelola sebagai instrumen intervensi, dan penguatan kapasitas Pokdarwis sebagai hasil antara menuju desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Alur ini menunjukkan hubungan logis dan sistematis antara konteks, proses, dan hasil kegiatan PkM di Desa Kersik.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PkM ini menyimpulkan bahwa persoalan utama Desa Wisata Kersik bukan terletak pada keterbatasan potensi alam, melainkan pada belum optimalnya tata kelola kelembagaan Pokdarwis. Pendampingan partisipatif yang dilakukan telah berhasil mentransformasi Pokdarwis dari organisasi yang tidak terstruktur menjadi lembaga yang memiliki landasan operasional jelas, ditandai dengan tersusunnya visi-misi, struktur organisasi fungsional, program kerja berjenjang, dan draf SOP pelayanan. Capaian ini menegaskan bahwa penguatan aspek manajerial merupakan fondasi krusial yang mengubah pola pengelolaan wisata dari semula bersifat sporadis menjadi lebih terencana dan profesional.

Lebih lanjut, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang bersifat dua arah efektif dalam menumbuhkan rasa memiliki serta kesadaran kolektif masyarakat. Keberhasilan proses ini membuktikan bahwa dokumen kelembagaan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan alat pembelajaran institusional yang harus disusun secara kontekstual sesuai kapasitas SDM lokal. Sinergi antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan Pokdarwis menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa hasil pendampingan memiliki legitimasi kuat untuk mendukung keberlanjutan desa wisata di masa depan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pokdarwis diharapkan segera melakukan finalisasi dan implementasi SOP secara konsisten dalam praktik pengelolaan wisata sehari-hari. Pemerintah Desa perlu membangun sinergi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengakomodasi kebutuhan infrastruktur dasar seperti aksesibilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, evaluasi rutin terhadap program kerja harus tetap dilaksanakan guna menjaga relevansi kegiatan dengan dinamika kebutuhan desa.

Untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang, direkomendasikan adanya upaya kaderisasi yang sistematis dengan melibatkan pemuda desa dalam struktur organisasi. Terakhir, pengembangan narasi promosi yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan perlu diperkuat guna meningkatkan daya saing Desa Kersik di tingkat regional. Seluruh langkah ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa penguatan kelembagaan yang telah diinisiasi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya kepada kepala Bidang Destinasi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami di Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda untuk menjalankan program pendampingan desa wisata serta universitas mulawarman program studi Administrasi Publik. Kerjasama ini merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MOU) antara Direktur POLNES dengan Bupati kabupaten Kutai Kartanegara serta implementasi berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor. P.61/DISPAR/100.3.7/5/2025 dan 940/PL7/KS/2025.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anarini, D. T. P., Parwati, K. S. M., I Gusti Made Riko Hendrajana, & Amir, F. L. (2024). Implementasi Community Based-Tourism Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis*, 3(6), 872–881. <https://doi.org/10.22334/paris.v3i6.675>

- Firdaus, F., Hardjosoekarto, S., & Lawang, R. M. (2021). The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(7), 1299–1307. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160710>
- Handiman, U. T., RACHBINI, D. J., CHAN, S., & Riyanto, S. (2024). How to Increase Sustainable Rural Tourism Performance? An Empirical Study in Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 52(1), 150–164. <https://doi.org/10.30892/gtg.52114-1191>
- He, Y., Gao, X., Wu, R., Wang, Y., & Choi, B. (2021). How Does Sustainable Rural Tourism Cause Rural Community Development? *Sustainability*, 13(24), 13516. <https://doi.org/10.3390/su132413516>
- Huang, J.-C., Wang, J., Nong, Q., & Xu, J. (2023). Using a Modified DANP-mV Model to Explore the Improvement Strategy for Sustainable Development of Rural Tourism. *Sustainability*, 15(3), 2371. <https://doi.org/10.3390/su15032371>
- Jia, Y., Liu, R., Li, A., Sun, F., & Yeh, R. (2022). Rural Tourism Development Between Community Involvement and Residents' Life Satisfaction: Tourism Agenda 2030. *Tourism Review*, 78(2), 561–579. <https://doi.org/10.1108/tr-02-2022-0097>
- Li, Y., Ismail, M. A., Aminuddin, A., Wang, R., Jiang, K., & Yu, H. (2025). The Lost View: Villager-Centered Scale Development and Validation Due to Rural Tourism for Traditional Villages in China. *Sustainability (Switzerland)*, 17(6). Scopus. <https://doi.org/10.3390/su17062721>
- Orozco, E. L. V., Polanco, J., & Hernandez-Diaz, P. M. (2024). Does Collaborative Governance Mediate Rural Tourism to Achieve Sustainable Territory Development? Evidence of Stakeholders' Perceptions in Colombia. *Sustainable Development*, 33(1), 493–507. <https://doi.org/10.1002/sd.3117>
- Rudiyanto, R., & Hutagalung, S. (2021). Pengelolaan Potensi Pariwisata Desa Watu Tiri Dengan Pendekatan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(1), 1–6. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i1.8713>
- Saputro, K. E. A., Hasim, H., Karlinasari, L., & Beik, I. S. (2023). Evaluation of Sustainable Rural Tourism Development With an Integrated Approach Using MDS and ANP Methods: Case Study in Ciamis, West Java, Indonesia. *Sustainability*, 15(3), 1835. <https://doi.org/10.3390/su15031835>
- Sutomo, Y. A. W., Sianipar, C. P. M., Onitsuka, K., & Hoshino, S. (2024). Evaluating Policy Environment for Community-based Rural Tourism: Multi-Actor Perspectives in Tourism Value Chain. *Journal of Regional and City Planning*, 35(3), 280–304. <https://doi.org/10.5614/jpww.2024.35.3.3>
- Wan, H., & Sikka, S. (2023). Spatial Sequence Evolution—Research on the Sustainable Development of Rural Tourism Space. *Academic Journal of Architecture and Geotechnical Engineering*, 5(8). <https://doi.org/10.25236/ajage.2023.050801>
- Widawski, K., Krzemińska, A., Zaręba, A., & Dzikowska, A. (2023). A Sustainable Approach to Tourism Development in Rural Areas: The Example of Poland. *Agriculture*, 13(10), 2028. <https://doi.org/10.3390/agriculture13102028>

Yiqing, S., Li, R., Shu, Q., & Wang, Y. (2024). Governing the Tourism Commons: Can Self-Governing Institutions Ensure the Continuation of the Rural Tourism Life Cycle? *Journal of Travel Research*, 64(3), 576–595. <https://doi.org/10.1177/00472875231222834>